

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun pada saat yang sama memunculkan bentuk kejahatan baru di ruang siber. Salah satu fenomena yang mengemuka ialah peretasan situs pemerintah daerah yang dimanfaatkan sebagai sarana promosi perjudian *online*. Praktik tersebut tidak hanya mengganggu keamanan sistem elektronik negara, tetapi juga memperluas jangkauan tindak pidana perjudian. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap CS yang turut serta melakukan peretasan situs milik Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Kupang untuk kepentingan promosi judi *online*, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Analisis didasarkan pada teori tindak pidana, penyertaan (*deelneming*), dan pertanggungjawaban pidana, dengan dukungan kajian pustaka hukum pidana dan hukum siber. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dengan penggalan data berupa studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CS dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya sebagai pengelola judi *online* sekaligus pihak yang turut serta dalam peretasan sistem elektronik pemerintah, dengan penerapan UU ITE sebagai *lex specialis* dan KUHP sebagai dasar penguatan delik.

Kata kunci : peretasan, judi *online*, pertanggungjawaban pidana, UU ITE, penyertaan tindak pidana.

ABSTRACT

*The development of information technology in Indonesia has driven digital transformation in government administration, but at the same time, it has given rise to new forms of crime in cyberspace. One emerging phenomenon is the hacking of local government websites, which are used to promote online gambling. This practice not only compromises the security of the country's electronic systems but also expands the reach of gambling crimes. This study examines the criminal liability of CS who participated in hacking the website of the Kupang Environmental and Forestry Training Center (BDLHK) for the purpose of promoting online gambling, reviewed from the Criminal Code and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The analysis is based on the theories of criminal acts, complicity (*deelneming*), and criminal liability, supported by a literature review of criminal law and cyber law. This study uses normative legal methods through a statutory and conceptual approach, with data collection in the form of a literature review of primary and secondary legal materials and an analysis of court decisions. The research results indicate that CS can be held criminally liable for his actions as an online gambling operator and a party involved in hacking government electronic systems, with the Electronic Information and Transactions Law (ITE) as the *lex specialis* and the Indonesian Criminal Code (KUHP) as the basis for strengthening the offense.*

Keywords : hacking, online gambling, criminal liability, ITE Law, involvement in criminal acts.

DAFTAR ISI